

DISPARITAS PEMBANGUNAN DAN KETIDAKSETARAAN SOSIAL: AKAR MUNCULNYA KRISIS NASIONALISME DI INDONESIA

Khairul hafizan¹, Samiuddin², Jubaida F Abdullah³

Universitas Pendidikan Mandalika^{1,2,3}

e-mail: khairul@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan infrastruktur serta kesenjangan sosial di Indonesia, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua, Maluku, dan Aceh, menjadi faktor pemicu melemahnya semangat nasionalisme yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat rasa ketidakadilan dan mendorong timbulnya gerakan separatis baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia dan membandingkannya dengan strategi pemerataan pembangunan yang diterapkan di China, guna memberikan rekomendasi solusi yang relevan bagi konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, data statistik, serta studi kasus yang memiliki keterkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah, tingkat ketimpangan antarwilayah masih cukup tinggi akibat terbatasnya infrastruktur, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, China berhasil mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui penerapan strategi nasional yang terintegrasi, pemberian insentif investasi, serta perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan pemerataan pembangunan di Indonesia dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari China, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas fiskal daerah, pengembangan infrastruktur konektivitas, serta penyelarasan antara perencanaan nasional dan daerah untuk memperkuat semangat nasionalisme dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Kata Kunci: *Pemerataan Infrastruktur, Nasionalisme, Kesenjangan Sosial*

ABSTRACT

The imbalance in infrastructure development and social inequality in Indonesia, especially in the 3T (Underdeveloped, Frontier, and Outermost) regions such as Papua, Maluku, and Aceh, are factors that trigger a weakening of nationalism, which has the potential to threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The main problem faced is the unequal access to infrastructure, education, and economy, which ultimately reinforces the sense of injustice and encourages the emergence of separatist movements at both the national and international levels. The purpose of this study is to analyze the factors causing development inequality in Indonesia and compare them with the development equalization strategies implemented in China, in order to provide relevant recommendations for the Indonesian context. The research method used is a literature study by examining various academic sources, statistical data, and case studies related to the topic. The results of the study show that, although Indonesia has experienced economic growth in a number of regions, the level of inequality between regions is still quite high due to limited infrastructure, low access to education, and weak regional fiscal capacity. In contrast, China has succeeded in reducing regional disparities through the implementation of integrated national strategies, investment incentives, and

Copyright (c) 2025 MONETER : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi

consistent long-term development planning. Based on these findings, this study recommends the need for reforming development equity policies in Indonesia by adopting best practices from China, particularly in terms of increasing regional fiscal capacity, developing connectivity infrastructure, and harmonizing national and regional planning to strengthen nationalism and prevent national disintegration.

Keywords: *Infrastructure Equity, Nationalism, Social Inequality*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk di wilayah Indonesia. Seperti pemerintah yang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) berharap IKN dapat bisa meningkatkan persentase ekonomi Indonesia. Diharapkan IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan memicu pembangunan infrastruktur dan bisnis di wilayah sekitar. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat (Alzulin, 2024). Akan tetapi dalam pembangunan infrastruktur harus adanya pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antara wilayah, misalnya wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) contohnya seperti Maluku dan Papua, masih banyak masyarakat Maluku dan Papua yang merasakan kurangnya perhatian pemerintah untuk wilayahnya dari fasilitas yang kurang dan juga bantuan seperti pembangunan jembatan, jalan alternatif dan lain sebagainya. Bahkan hal ini bisa memicu perpecahan terhadap kedaulatan di Indonesia (Herman, 2025).

Contohnya pada 25 April 2025 di New York pada saat acara United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang diselenggarakan oleh PBB. Contohnya, pada 25 April 2025 di New York, pada saat acara United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang diselenggarakan oleh PBB, terjadi insiden yang menarik perhatian internasional. Mereka merupakan warga negara Indonesia, mengenakan pakaian adat, mengangkat poster bertuliskan "Free Maluku", "Free Papua", dan "Free Aceh" di ruang Sidang Majelis Umum PBB.



Sumber: Kompas TV

Pada gambar tersebut, mereka mengidentifikasi diri sebagai perwakilan dari kelompok separatis Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Hal ini dinilai tindakan penyalahgunaan yang dapat merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena menyerukan kemerdekaan bagi wilayah Indonesia di forum internasional adalah tindakan yang tidak menunjukkan jiwa nasionalisme. Kemudian hal ini mengutip dari (Kompas, 2025), Insiden ini menyoroti pentingnya menjaga etika dan tujuan dari forum internasional seperti UNPFII, yang seharusnya menjadi ruang untuk diskusi konstruktif mengenai pemberdayaan masyarakat adat, bukan untuk menyuarakan agenda separatis. Penting bagi semua pihak untuk menghormati kedaulatan negara dan menjaga integritas forum internasional (Adit, 2025).

Solusi dari permasalahan ini sangat diperhatikan untuk ancaman dan masalah tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini karena dapat mengancam stabilitas negara. Jika tidak segera

tercapai, penyelesaian akan menyebabkan konflik yang semakin parah dan memicu perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi atau konflik seperti ini dapat terjadi berkali-kali, menyebabkan perpecahan bangsa dan mengurangi rasa nasionalisme masyarakat. (1) Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah salah satu masalah utama yang memperparah keadaan ini. Tidak meratanya infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam, terutama di wilayah terutama pada daerah Maluku dan Papua . Masyarakat setempat akan merasa pemerintah pusat mengabaikan mereka dan tidak memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat di daerah lain. Ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap negara meningkat akibat perasaan tertinggal ini. Nasionalisme secara bertahap menghilang dan digantikan oleh rasa kedaerahan ketika rasa keadilan sosial tidak tercapai. Hal ini dapat menyebabkan gerakan fragmentasi dan meningkatkan risiko konflik vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan menjaga keutuhan NKRI, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Dalam mengatasi masalah yang terus berlanjut pemerintah perlu menerapkan suatu program seperti dengan negara berkembang lainnya seperti China. Pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada 2025 dengan janji menciptakan 12 juta lapangan kerja baru di kota-kota. Hal ini menunjukkan fokus pada pemerataan kesempatan ekonomi yang menjadi bagian dari semangat nasionalisme pembangunan (Voa, 2025). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional China (sejalan dengan RPJPN Indonesia sebagai perbandingan), terdapat strategi pemerataan pembangunan yang mencakup peningkatan kapasitas pembiayaan dan manajemen investasi berkualitas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, termasuk pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Ini menunjukkan kesadaran nasional untuk membangun seluruh wilayah secara merata demi persatuan dan kemajuan bersama.

Aspek	Indonesia	China
Cakupan Wilayah	Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau.	Negara kontinental dengan wilayah luas, terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, barat, timur, dan tengah.
Tantangan Pemerataan	Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, daerah timur Indonesia masih tertinggal dibanding barat.	Ketimpangan antara daerah pesisir timur yang maju dan daerah barat/tengah yang tertinggal.
Strategi Pemerataan	Pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan; program Dana Desa; kerja sama internasional (misal dengan China).	Program “Western Development Strategy” (WDS) untuk meningkatkan investasi infrastruktur di daerah barat.
Hasil Pemerataan	Pembangunan masih terpusat di Jawa dan kawasan barat; ketimpangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi.	Investasi infrastruktur di daerah barat meningkat signifikan sejak WDS; ketimpangan berkurang secara bertahap.
Kerja Sama Internasional	Banyak proyek infrastruktur besar mendapat dukungan dana dan teknologi dari China.	Memiliki kapasitas pembiayaan dan teknologi sendiri, namun tetap membuka peluang investasi asing.

Dampak Ekonomi	Infrastruktur pertumbuhan ekonomi lokal, namun manfaat belum merata di seluruh wilayah.	Infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, meningkatkan produktivitas dan konektivitas.
----------------	---	--

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur karena kondisi geografis dan ketimpangan antarwilayah, sementara China telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur melalui strategi nasional seperti Wireless Distribution System (WDS). Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan setiap kebijakan yang telah diterapkan seperti di negara China untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library Research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara sistematis konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu nasionalisme, ketimpangan pembangunan, dan peran kebijakan negara dalam konteks Indonesia dan Tiongkok. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga internasional, serta media publikasi terpercaya yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti *nasionalisme*, *pembangunan infrastruktur*, *ketimpangan wilayah*, *Indonesia*, dan *China*; (2) pemilihan sumber berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan kebaruan publikasi; (3) pengelompokan literatur berdasarkan tema kajian; serta (4) analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola kebijakan yang mempengaruhi dinamika nasionalisme di kedua negara.

Sebagai landasan analisis, penelitian ini juga merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu. Alfiana dkk. Menyoroti krisis identitas nasional sebagai tantangan serius bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi, yang berpotensi membunuh pemusnahan bangsa apabila tidak ditangani secara strategis melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ritonga dkk. menemukan bahwa rendahnya pemahaman identitas nasional pada siswa berdampak pada menurunnya rasa cinta tanah air, sehingga diperlukan peran aktif institusi pendidikan dalam menanamkan nilai nasionalisme secara kontekstual. Manurung dkk. Penekanan pentingnya reorientasi pendidikan karakter serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penguatan identitas nasional generasi muda. Sementara itu, Hussain menegaskan bahwa nasionalisme tidak harus bertentangan dengan globalisasi, melainkan dapat dikembangkan secara inklusif untuk mendukung keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pendekatan studi literatur ini, penelitian berupaya menyusun kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana faktor kebijakan pembangunan, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika global mempengaruhi corak nasionalisme di Indonesia dan Tiongkok, tanpa melibatkan pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kondisi Sosial-Ekonomi Papua

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Papua mencatat tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 26,03%, sementara Papua

Barat mencapai 20,49% . Angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan mencerminkan belum optimalnya dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, struktur ketenagakerjaan Papua didominasi oleh sektor informal, dengan proporsi mencapai 84,43% dari total tenaga kerja.

Dari sisi pendidikan, lebih dari 665 ribu tenaga kerja di Papua merupakan penduduk yang tidak bersekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (diploma dan universitas) hanya sekitar 170 ribu orang (Kumparan, 2023). Data ini menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja formal dan produktivitas ekonomi masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Maluku

Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,52% (year-on-year) pada tahun 2024, menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan hasil perikanan, serta peningkatan ekspor hasil laut (Bank Indonesia Provinsi Maluku, 2024). Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum merata secara spasial. Ketimpang pembangunan masih terlihat jelas antara pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Ambon dan wilayah kepulauan kecil yang luas. Keterbatasan konektivitas transportasi laut, infrastruktur pelabuhan, dan jaringan logistik menyebabkan disparitas harga barang kebutuhan pokok serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi.

3. Struktur Ekonomi Aceh

Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada triwulan III tahun 2024, disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan terbuka menjadi 5,75% (BPS Aceh, 2024). Peningkatan ini didukung oleh proyek-proyek infrastruktur dan pertumbuhan sektor jasa, termasuk pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Meski demikian, perekonomian Aceh masih menunjukkan kerentanan struktural akibat ketergantungan yang tinggi terhadap dana otonomi khusus (otsus) . Ketergantungan fiskal ini membatasi anggaran daerah dan menghambat pengembangan basis ekonomi yang mandiri. Selain itu, sektor ekspor, khususnya pertanian dan perikanan, belum berkembang optimal akibat rendahnya nilai tambah dan minimnya industrialisasi.

4. Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi Tiongkok

Pada tahun 2024, Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, didorong oleh investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural. Pemerintah Tiongkok mengalokasikan dana sekitar 1 triliun yuan untuk proyek infrastruktur dan teknologi hijau, yang mempercepat pembangunan jaringan transportasi, pelabuhan modern, serta zona ekonomi digital (Xinhua, 2024). Pembangunan tersebut diperkuat oleh kebijakan jangka panjang seperti pengembangan Zona Ekonomi Khusus (KEK), program “Go West”, dan perencanaan pembangunan melalui *Rencana Lima Tahun* , yang secara konsisten mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama di wilayah Papua, Maluku, dan Aceh. Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, ketimpangan spasial terjadi ketika investasi dan aktivitas ekonomi terlihat pada wilayah tertentu, sementara wilayah lain tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur, dan kapasitas institusional (Kanbur & Venables, 2015).

Kasus Papua menunjukkan bagaimana keterbatasan pendidikan dan infrastruktur dasar berkontribusi pada kemiskinan struktural. Rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya berdampak pada kemiskinan, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memperkuat lingkaran kemiskinan dalam jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Bank Dunia (2020) yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pendidikan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas dan mobilitas sosial di wilayah tertinggal.

Di Maluku, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa konektivitas pemerataan dan layanan dasar cenderung menghasilkan pembangunan yang eksklusif. Fenomena ini mendukung argumen Rodríguez-Pose (2018) bahwa ketimpangan wilayah yang berkelanjutan dapat memicu rasa keterpinggiran sosial dan meningkatkan kohesi nasional. Sementara itu, kondisi Aceh menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak terlepas dari penguatan struktur ekonomi dan industrialisasi berisiko menciptakan ketergantungan fiskal. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat membatasi kemandirian ekonomi daerah dan menghambat transformasi ekonomi jangka panjang.

Berbeda dengan Indonesia, Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan apabila didukung oleh perencanaan jangka panjang, desentralisasi fiskal yang efektif, serta kebijakan insentif yang konsisten. Melalui KEK, strategi subsidi, dan mekanisme pembiayaan inovatif, Tiongkok mampu mendorong pertumbuhan wilayah tertinggal sekaligus memperkuat integrasi nasional. Hal ini memperkuat pandangan bahwa nasionalisme pembangunan dapat dibangun melalui keadilan spasial dan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, pembelajaran dari Tiongkok menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga strategi penting dalam memperkuat nasionalisme, menjaga stabilitas sosial, dan mempertahankan keutuhan negara, khususnya di negara multietnis dan multiregional seperti Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama di wilayah Papua, Maluku, dan Aceh. Meskipun wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif positif, manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata. Papua masih menghadapi kemiskinan struktural yang dipengaruhi oleh terbatasnya akses pendidikan dan dominasi sektor informal, Maluku mengalami ketimpangan spasial akibat tambah lemahnya konektivitas antarwilayah kepulauan, sementara Aceh menunjukkan kerentanan ekonomi karena ketergantungan fiskal dan rendahnya nilai sektor unggulan.

Perbandingan dengan Tiongkok menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, konsisten, dan berorientasi jangka panjang mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Strategi seperti pengembangan Zona Ekonomi Khusus, perencanaan pembangunan jangka panjang, serta dukungan pembiayaan dan kebijakan yang terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan integrasi ekonomi lokal, guna memperkuat nasionalisme, menjaga stabilitas sosial, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2017). *Memenuhi kebutuhan infrastruktur Asia* . Bank Pembangunan Asia. <https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs>
- Adit. (2025). Insiden UNPFII dan tantangan pelestarian Indonesia. *Kompas* . <https://www.kompas.com/>
- Alzulín, A. (2024). Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional* , 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jpn.v12i1.2024>
- Aspinall, E. (2014). Paradoks Indonesia: Stabilitas dan stagnasi. *Jurnal Demokrasi* , 25(4), 20–34. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0076>
- Bank Dunia. (2020). *Laporan Pembangunan Dunia 2020: Perdagangan untuk Pembangunan di Era Rantai Nilai Global* . <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>
- Bank Dunia. (2022). *Pembaruan ekonomi Tiongkok* . <https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update>
- Bank Indonesia Provinsi Maluku. (2024). *Laporan perekonomian Provinsi Maluku 2024* . <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi.aspx>
- BBC Indonesia. (2023). Kemiskinan di Papua dan tantangan pembangunan. <https://www.bbc.com/indonesia>
- BPS Aceh. (2024). *ketenagakerjaan dan pertumbuhan Keadaan ekonomi Aceh* . <https://aceh.bps.go.id>
- BPS. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia* . Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastruktur, pertumbuhan, dan ketidaksetaraan: Sebuah tinjauan umum. *Makalah Kerja Penelitian Kebijakan Bank Dunia* , No. 7034. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7034>
- Fan, S., Kanbur, R., & Zhang, X. (2011). Disparitas regional Tiongkok: Pengalaman dan kebijakan. *Review of Development Economics* , 15(4), 673–692. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00628.x>
- Hadiz, VR (2018). *Ekonomi politik Indonesia ditinjau kembali* . Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315168426>
- Jerman. (2025). Ketimpangan pembangunan dan ancaman disintegrasi nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional* , 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.1234/jkn.v18i1.2025>
- Kanbur, R., & Venables, AJ (2015). *Ketidaksetaraan spasial dan pembangunan* . Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198733201.001.0001>
- Kompas. (2025). Forum internasional dan isu separatisme Indonesia. <https://www.kompas.com/>
- Kumparan. (2023). Mayoritas tenaga kerja Papua berada di sektor informal. <https://kumparan.com/>
- Mietzner, M. (2020). Inovasi otoriter di Indonesia. *Demokratisasi* , 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1752566>
- Naughton, B. (2021). *Ekonomi Tiongkok: Adaptasi dan pertumbuhan* (edisi ke-2). MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262044601/>
- Rodríguez-Pose, A. (2018). Balas dendam tempat-tempat yang tidak penting. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* , 11(1), 189–209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- UNDP. (2019). *Laporan Pembangunan Manusia 2019: Melampaui Pendapatan* . Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2019>

VOA. (2025). China menargetkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. *Voice of America* . <https://www.voanews.com/>

Xinhua. (2024). Investasi infrastruktur Tiongkok meningkatkan ketahanan ekonomi. <https://english.news.cn/>